

## Analisis perilaku memilih pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017

**Frans Bapa Tokan**

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

### INTISARI

Tulisan ini mengajukan pertanyaan utama apakah perilaku memilih warga Kota Kupang 2017 dipengaruhi oleh faktor sosiologis atau psikologis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan teknik *multistage random sampling*. Hasilnya ditemukan bahwa perilaku memilih warga Kota Kupang mayoritas cenderung berkarakter sosiologis, yakni sebesar 63,50%, dengan sebaran dari akumulasi dua pasang calon atas nama Yonas Salean dan Niko Frans (disingkat Sahabat) sebesar 31% dan Jefri Riwu Kore dan Herman Man (disingkat FirmanMu) sebesar 32,50%. Sedangkan untuk alasan psikologis jauh lebih kecil, yakni hanya 21% dari akumulasi dua pasang paket calon atas nama Sahabat sebesar 12% dan FirmanMu sebesar 9%. Sedangkan sebagian lainnya memilih calon atas pertimbangan pragmatis yaitu sebesar 15,50% karena diberi bantuan barang atau uang menjelang hari pencoblosan. Jadi disimpulkan bahwa faktor sosiologis perilaku pemilih warga Kota Kupang lebih dominan dalam menentukan pilihan calon kepala daerahnya.

### KATA KUNCI

Perilaku Memilih, Sosiologis; Psikologis; Pilkada

### Pendahuluan

Studi perilaku memilih sesungguhnya bukan merupakan hal baru dalam ilmu politik. Studi ini telah lama berkembang dan menghasilkan temuan-temuan berharga bagi sejumlah negara maju yang tradisi dan kualitas berdemokrasinya sudah berkembang pesat dan terlembaga. Kajian tentang perilaku memilih sebenarnya telah lama dilakukan oleh sejumlah ilmuwan Indonesia dengan fokus kajian pada proses Pemilu yang berhubungan dengan dinamika politik seputar pemilu, kinerja partai politik dan sengketa pemilu. Kajian perilaku memilih dewasa ini makin menarik dan bermanfaat menjelaskan faktor atau alasan pemilih menjatuhkan pilihan pada calon dan partai politik tertentu, namun hasil kajiannya masih relatif terbatas. Studi yang dilakukan

---

#### Korespodensi:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira  
Jl. A. Yani No.66, Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Email: frans.fisipunwira@gmail.com

oleh Gaffar (1992) berusaha menjelaskan tentang perilaku memilih di kalangan masyarakat Jawa, yakni mengapa masyarakat memilih partai politik tertentu dalam pemilu Orde Baru. Faktor apa yang menyebabkan seorang memilih Golkar, PDI dan PPP. Selain itu studi yang dilakukan oleh Mallarangeng (1997), yakni berusaha menjelaskan faktor yang mempengaruhi pilihan seseorang pada partai politik di masa orde baru pada pemilu tahun 1977, 1982, 1987 dan 1992.

Studi perilaku memilih di Indonesia mulai banyak dilakukan sejak tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998. Beberapa diantaranya adalah studi Qodari (2007), Ananta, Arifin, & Suryadinata (2004), dan King (2003) yang memakai perilaku memilih sebagai lokus kajiannya. Argumen menarik dikemukakan King (2003) yang berusaha memahami dan mendeskripsikan apakah ada persamaan pilihan antara pemilih tahun 1955 dengan pemilih pada Pemilu 2004. Temuan King (2003) menunjukkan bahwa sebenarnya ada kesinambungan signifikan antara daerah-daerah pendukung partai politik tertentu pada tahun 1955 dan daerah-daerah pendukung partai-partai tertentu pada pemilu 1999.

Berkaitan dengan itu studi perilaku politik yang dilakukan oleh Alfitri (2014) di Kelurahan Sako, Kota Palembang, menunjukkan bahwa perilaku politik transaksional terjadi karena warga masyarakat sebagai pemilih belum merasakan secara signifikan hasil pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan. Selain itu menurut Alfitri (2014) perilaku pragmatis para caleg dalam pemilu terjadi karena parpol gagal memberikan pendidikan politik bagi para calegnya.

Sebaliknya studi perilaku dengan menggunakan data agregat akan memanfaatkan data sekunder yang tersedia di BPS, KPU/KPUD maupun instansi terkait lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Ananta dkk (2004) Mallarangeng (1997), dan King (2003) termasuk dalam kategori penelitian menggunakan data agregat. Dengan demikian kedalaman analisis akan lebih efektif jika menggunakan kombinasi data agregat dan data primer yang diperoleh dari narasumber yang terpercaya di lapangan. Studi perilaku memilih yang dilakukan ini mencoba mengungkap peta perilaku memilih masyarakat menjelang Pilkada di Kota Kupang Tahun 2017 dari perspektif sosiologis dan psikologis.

Untuk memenuhi ekspektasi di atas, maka penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan maksud melakukan pengukuran secara cermat terhadap fenomena sosial politik tertentu. Dalam konteks penelitian ini survei akan difokuskan pada kecenderungan perilaku memilih dalam pikada Kota Kupang pada Tahun 2017. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk menjamin tingkat representasi adalah teknik sampel acak bertingkat atau disebut dengan *Multistage Random Sampling*. Responden ditetapkan sebanyak 510 orang yang tersebar pada 51 kelurahan di enam kecamatan Kota Kupang.

### **Tinjauan Teoritik: Persepsi dan Perilaku Pemilih**

Persepsi secara sederhana dapat diartikan sebagai penglihatan atau bagaimana cara seseorang/pemilih melihat sesuatu obyek. Pemilih adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Pemilih dalam kaitan dengan pilkada senantiasa memiliki pemahaman dan penilaian yang beragam atas sesuatu obyek yang dilihatnya. Cara pandang yang cenderung berbeda antara satu pemilih dengan lainnya, setidaknya terjadi karena adanya pengalaman mengenai obyek atau suatu peristiwa yang dialami atau yang disebut dengan proses persepsi.

Menurut Rakhmat (2003) persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sarwono (2006) mengemukakan persepsi, yang merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan semua obyek, yang disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Sedangkan menurut Walgito (2004) persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya dan stimulus itu diteruskan ke syaraf dan terjadilah proses psikologi sehingga individu menyadari adanya apa yang ia lihat, dengar, sentuh, dan rasakan.

Berkaitan dengan pandangan di atas menurut Sobur (2003: 446) dalam persepsi terkandung tiga unsur utama sebagai berikut: (1) Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit; (2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang; (3) Interpretasi dan persepsi, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Mencermati sejumlah pandangan dimuka mengenai persepsi, maka, sejatinya persepsi pemilih merupakan respon seseorang yang memiliki hak untuk memilih dalam pilkada atau pemilu terhadap suatu obyek berupa orang atau kontestan dengan segala kelebihan dan kekurangan, maupun gagasan, isu dan berbagai cara yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya dalam pemilu /pilkada. Dalam kaitan dengan itu, maka pemilih secara esensial merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas bagus atau tidaknya sebuah proses dan hasil dari Pemilu/Pilkada. Menurut Firmansyah (2010), secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan diyakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan ke dalam institusi politik seperti parpol.

Sedangkan untuk perilaku pemilih, salah satu perspektif yang dapat digunakan dalam memetakan dan mendeskripsikan pola perubahan perilaku memilih dalam menentukan pilihan politik pada pemilu atau pilkada dalam suatu wilayah adalah dengan menggunakan pendekatan *voting behavior approach*. Kajian teoritik tentang perilaku memilih merupakan suatu studi yang bertujuan mengungkapkan beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan seseorang cenderung memilih suatu partai, kader partai, atau kandidat tertentu yang berkompetisi dalam pemilu atau pilkada. Dalam konteks ini menurut Roth (2009) perilaku pemilih dapat dijelaskan melalui sejumlah pendekatan beberapa diantaranya adalah: (1) Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini

lahir dari studi-studi yang dilakukan oleh seorang sosiolog, Paul F. Lazarsfeld, bersama rekan kerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University Bureau of Applied Social Science, sehingga kemudian mazhab ini lebih dikenal dengan Mazhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behavior*).

Roth (2009) lebih lanjut mengemukakan pendekatan ini sesungguhnya bertumpu pada beberapa aspek hubungan kemasyarakatan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Karena itu setiap manusia selalu terikat di dalam berbagai lingkaran sosialnya, antara lain (a) status sosial-ekonomi, semisal: tingkat pendidikan, jabatan dan jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas sosial; (b) agama, (c) etnik dan wilayah tempat tinggal semisal: kota, desa, daerah pesisir, ataupun pegunungan). Dengan begitu studi perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis dapat dijelaskan dengan beberapa indikator berikut: (a) kesamaan status sosial (jabatan, pekerjaan, pendapatan dan pendidikan); (b) kesamaan gender (jenis kelamin); dan (c) usia, (d) kesamaan suku, agama, ras dan golongan, (e) tempat tinggalnya.

Sedangkan pendekatan psikologis menurut Roth (2009) yang berusaha menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Pendekatan ini berusaha menjelaskan melalui relasi tiga aspek psikologis, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu-isu politik. Roth lebih lanjut menjelaskan bahwa para peneliti dari Michigan's School lebih melihat perilaku pemilih dengan mengkaji sang individu itu sendiri sebagai pusat perhatiannya. Dalam pendekatan yang sama, Ambardi, Mujani, & Liddle (2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*). Dengan demikian perilaku memilih seseorang dapat dipengaruhi oleh keterkaitan tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek-aspek Pemilu, seperti; (a) keterkaitan seseorang dengan partai politik, (b) orientasi seseorang terhadap isu-isu politik, (c) orientasi seseorang terhadap kandidat.

Uniknya, identifikasi partai dengan segmen identitas tertentu ini kadangkala juga mengalami ketidakkonsistenan. Demokrat yang lahir dari rahim nasionalis menyebut dirinya sebagai partai nasionalis religius di kemudian hari. PKB yang identik dengan NU lebih suka disebut sebagai partai terbuka, termasuk bagi non-Nahdliyin. PPP, PAN, PBB bahkan PKS juga melakukan hal yang sama. Awal reformasi kita masih bisa mengingat dengan baik bagaimana partai-partai ini mendaku dirinya sebagai partai yang menerima siapa saja didalam kendaraannya. PAN, misalnya, tidak segan merekrut kader Tionghoa, dan bahkan di antaranya bukan Muslim. Kini, ketika konstelasi politik sedikit bergeser terutama sejak Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2016/2017, PAN,

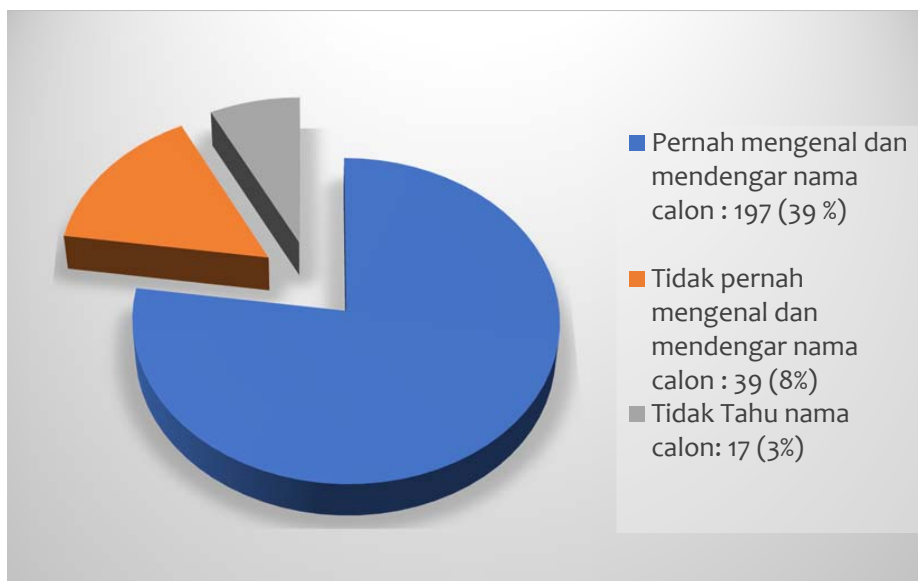
PPP dan PKS lebih menunjukkan corak eksklusifnya, menolak kandidat non-muslim dan turut mengkampanyekan politik anti-kafir.

Berkaitan dengan perilaku pemilih, Firmansyah (2010) kemudian mencoba merumuskan beberapa tipe pemilih ke dalam empat bagian, yakni (a) pemilih rasional; (b) pemilih kritis; (c) pemilih tradisional; (d) pemilih skeptis. Pandangan yang tidak jauh berbeda diungkapkan juga oleh Pamungkas (2009: 74-75), bahwa secara teoritik terdapat tiga penjelasan dalam memahami perilaku politik pemilih, yakni: (a) penjelasan party identification, atau yang lebih dikenal dengan pendekatan psikologis; (b) penjelasan sosiologis; (c) penjelasan pilihan rasional. Selain tiga tipe ini menurut Pamungkas (2009: 75), masih ada penjelasan patron-klien, yaitu perilaku memilih yang sangat tergantung pada bagaimana perilaku elit panutannya (patron).

### Tingkat Popularitas Calon Walikota dan Wakil Walikota

Popularitas Calon Walikota-Wakil Walikota atas nama Jefri Riwu Kore dan Herman Man (Firmanmu) berdasarkan survei terhadap 510 responden pada pertengahan bulan Juli - Agustus 2016 lalu dapat dilihat pada grafik 1 berikut.

Grafik 1. Tingkat Popularitas Jefri Riwu Kore dan Herman Man (Firmanmu)



Sumber: Diolah dari data primer di lapangan, 2016

Data pada grafik 1 menunjukkan bahwa paket calon Walikota-Wakil Walikota Kota Kupang ini sudah dikenal oleh masyarakat Kota Kupang, yakni sebesar 39%. Sedangkan hanya sebagian kecil responden mengatakan tidak mengenal yaitu sebesar 8%, dan sebagian lagi mengatakan tidak tahu sebesar 3%. Kedua tokoh ini memang tidak asing lagi bagi warga Kota Kupang karena Jefri Riwu Kore adalah seorang pengusaha dan juga politisi senior tingkat nasional, dan saat ini

menjabat sebagai anggota DPR Pusat dari Partai Demokrat dari Dapil NTT, bahkan ia sudah berkompetisi ketiga kalinya dalam pilkada Kota Kupang. Sedangkan Calon Wakil Walikota adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter umum, dan sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Walikota Kupang. Karena itu tingkat keterkenalan kedua tokoh ini sudah tidak asing lagi dimata publik Kota Kupang.

Di sisi yang lain, popularitas Calon Walikota-Wakil Walikota atas nama Yonas Salean dan Niko Frans (Sahabat) berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara bersamaan pada pertengahan bulan Juli - Agustus 2016 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut.

Grafik 2. Tingkat Popularitas Yonas Salean dan Niko Frans (Sahabat)



Sumber: Diolah dari data primer di lapangan, 2016.

Data pada grafik 2 di atas menunjukkan bahwa popularitas calon Walikota-Wakil Walikota ini sedikit lebih unggul dari FirmanMu sebesar 2%. Temuan membuktikan bahwa responden yang mengatakan sudah pernah mengenal dan mendengar calon sebesar 41%; tidak pernah mengenal dan mendengar calon sebesar 6%, dan yang tidak tahu calon 3%. Data ini memperlihatkan bahwa popularitas calon Walikota-Wakil Walikota Kota Kupang atas nama Yonas Salean-Niko Frans juga tak perlu dipertanyakan lagi. Mengingat saat ini Yonas Salean sedang menjabat sebagai Walikota Kupang, sehingga waktu dan kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan warga sangat terbuka luas. Kedekatannya dengan warga kota membuat yang bersangkutan lebih dikenal dan populer jika dibandingkan dengan paket FirmanMu.

Di sisi lain calon wakilnya Niko Frans adalah politisi senior dari PDIP yang pernah menjabat anggota DPRD Kota Kupang selama tiga periode atau 15 tahun, yakni sejak tahun 1999 s/d 2014, ditambah rekam jejaknya ketika masih aktif menjadi anggota DPRD Kota sangat positif dimata publik sehingga ikut mendongkrak popularitas paket calon ini. Walaupun selisih angka di antara kedua paket calon ini mencapai 2%. Namun dalam politik, semua kemungkinanpun bisa terjadi dan perubahan elektabilitas atas kedua paket calon tersebut bisa terjadi naik dan turun sampai menjelang hari pencoblosan pada Bulan Februari 2017 yang akan datang. Hari pencoblosan masih tersisa waktu enam bulan kedepan, sehingga peluang dan potensi untuk naik dan turunnya tingkat elektabilitas seseorang calon sangat mungkin terjadi di antara kedua pasangan calon itu. Karena itu ketepatan memilih isu dan strategi yang relevan dari tim sukses, relawan dan partai politik pendukung masing-masing paket calon sangat dibutuhkan untuk menjaga soliditas peta dukungan. Kemampuan dan kecerdasan mendesain pendekatan dan komunikasi yang tepat terhadap konstituen adalah bagian dari strategi merebut simpati publik.

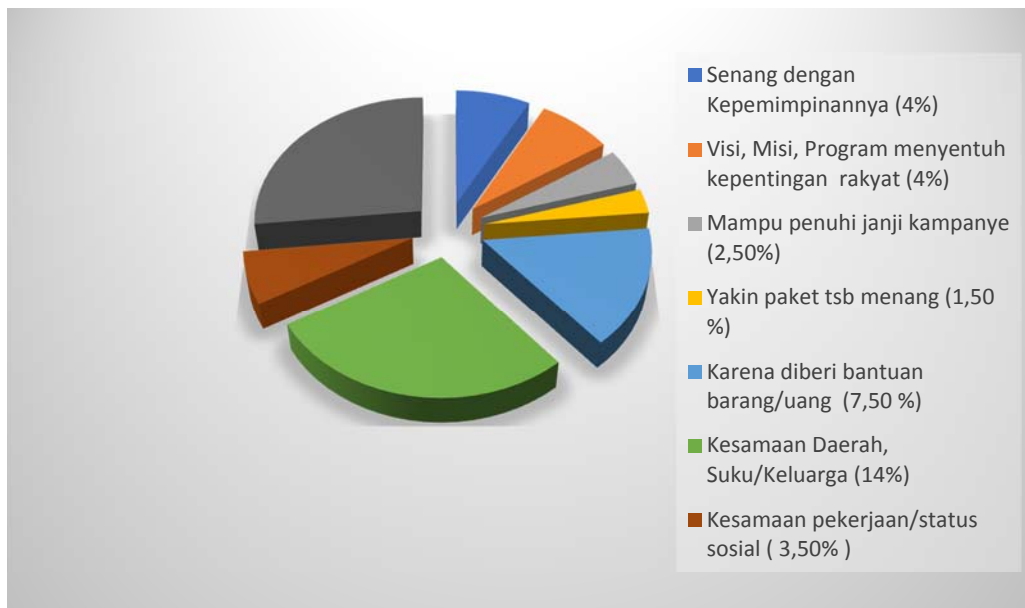
### Perilaku Memilih dalam Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Kupang

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perilaku (*voting behavior approach*), antara lain pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Kontestasi (pemilu) atau pilkada dalam perspektif kaum *behavioral* merupakan abstraksi dari sistem demokrasi prosedural yang mendorong para politisi atau calon-calon pemimpin atau peserta kontestasi mendisain alur dan ritme sikap dan pola perilaku dirinya sebagai kandidat dan calon pemimpin agar dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang.

Pendekatan pertama adalah sosiologis. Roth (2009) mengemukakan bahwa pendekatan sosiologis sesungguhnya berbasis pada beberapa aspek hubungan sosial seseorang dengan lingkungan sosialnya. Karena itu, setiap manusia selalu terikat di dalam berbagai lingkaran sosialnya, antara lain (a) status sosio-ekonomi, semisal: tingkat pendidikan, jabatan dan jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas sosial; (b) agama, (c) etnik dan wilayah tempat tinggal semisal: kota, desa, daerah pesisir, ataupun pegunungan). Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi. Sehingga kemudian turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri. Sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

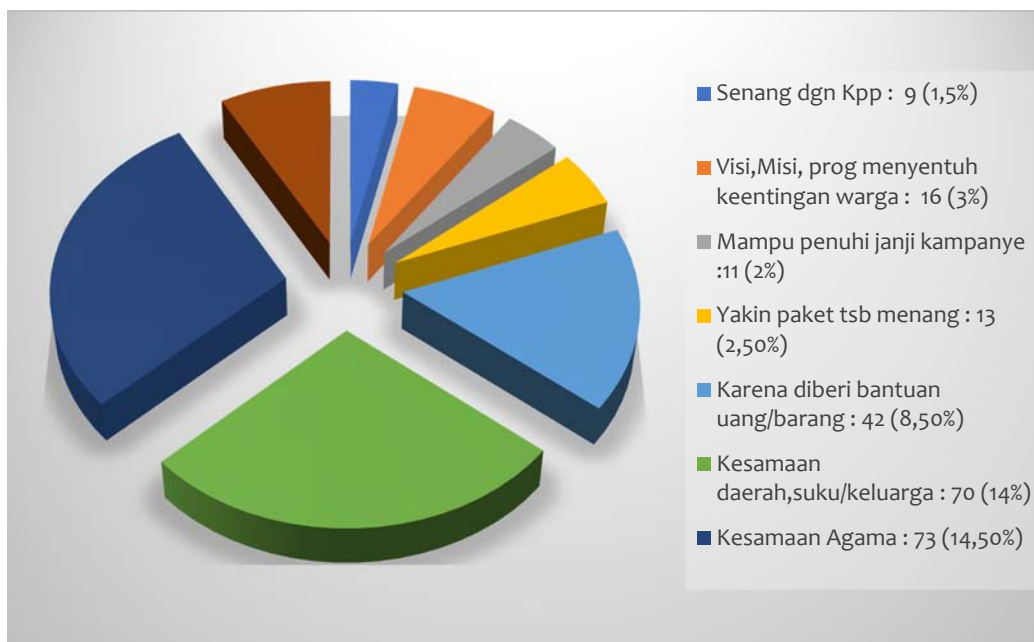
Temuan penelitian di lapangan membuktikan bahwa: pemilih Kota Kupang pada umumnya masih tergolong sebagai pemilih yang berkarakter sosiologis karena mayoritas responden cenderung memilih calon Walikota-Wakil Walikota berdasarkan pada alasan-alasan sosiologis yakni karena kesamaan daerah, suku, keluarga dan kesamaan agama, serta kesamaan pekerjaan/status sosial dengan para calon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3 dan grafik 4 berikut.

Grafik 3. Alasan Warga Kota Kupang memilih paket Sahabat



Sumber: Diolah dari data primer di lapangan, 2016.

Grafik 4. Alasan Warga Kota Kupang memilih paket Firmannu



Sumber: Diolah dari data primer di lapangan, 2016.

Berdasarkan temuan penelitian terhadap kedua paket atas nama: Yonas Salean/Niko Frans maupun paket atas nama Jefri Riwu Kore/ Herman Man memiliki basis dukungan pemilih dengan karakteristik sosiologis yang nyaris sama. Karena Yonas Salean dan Jefri Riwu Kore selaku calon



walikota memiliki latar belakang agama yang sama yakni beragama protestan tetapi keduanya berbeda suku. Demikian juga halnya dengan kedua calon Wakil Walikota yang sama-sama beragama Katolik dan berasal dari Pulau Flores tetapi hanya berbeda tempat asal kabupaten. Bertolak pada latar belakang agama dan tempat asal masing-masing calon telah mengakibatkan basis pemilih terbelah dua dengan kekuatan dukungan nyaris seimbang. Hal itu telah terkonfirmasi dari hasil olah data lapangan, dimana paket calon Walikota-Wakil Walikota atas nama Yonas Salean-Niko Frans dipilih karena alasan sosiologis, sebesar 156 orang responden (31% ) dari total responden sebanyak 510 orang, yaitu 73 responden (14,50%) memilih paket tersebut karena alasan kesamaan agama, 71 responden (14%) memilih paket karena alasan kesamaan daerah, suku/keluarga, sedangkan 17 orang responden (3,50%) memilih paket karena alasan kesamaan status sosial /pekerjaan.

Demikian juga halnya dengan paket calon walikota-wakil walikota atas nama Jefri Riwu Kore-Herman Man tidak jauh berbeda hasilnya, dimana sebanyak 164 responden (32,50%) dari total 510 orang responden, memilih karena alasan sosiologis, yaitu 68 responden (13,50%) memilih paket tersebut karena alasan kesamaan agama, 70 responden (14%) memilih paket karena alasan kesamaan daerah, suku/keluarga, sedangkan 21 orang responden (4%) memilih paket karena alasan kesamaan status sosial /pekerjaan.

Salah satu aspek penting dari karakter sosiologis yang menjadi alasan pemilih dalam menentukan pilihan politik atas paket calon yang dikehendaki adalah karena kesamaan agama. Kota Kupang dengan jumlah penduduk sebesar 347.523 jiwa, mayoritas beragama Kristen Protestan dan Katolik yang dapat dirincikan sebagai berikut: penduduk yang beragama Kristen Protestan: 255.661 jiwa (73,57%), Katolik: 79.935 jiwa (23,00%), Islam: 4.817 jiwa (1,39%), Hindu: 7.041 jiwa (2,03%), Budha: 62 Jiwa (0,02%) dan agama lainnya sebesar 7 jiwa (0,002%).

Dominasi penduduk Kota Kupang berdasarkan Agama Protestan dan Katolik dalam kenyataan telah membuka peluang yang sangat signifikan bagi para calon pemimpin, tim sukses, dan para relawan melakukan politisasi terhadap agama melalui para tokoh gereja dengan memanfaatkan mimbar-mimbar gereja dan berbagai acara keagamaan lain guna mempengaruhi para jemaat dan umat Kristiani agar memberi dukungan suara kepada para calon pemimpin yang seagama dengannya pada saat hari pencoblosan. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa agama masih menjadi alat politik yang efektif bagi para politisi yang haus kekuasaan ketika berkompetisi dalam pilkada. Hal ini setidaknya dapat menimbulkan polarisasi antar pemeluk agama yang kemudian dapat memicu konflik antar golongan dan berimplikasi pada ketimpangan pola pelayanan publik jika tidak ada langkah rekonsiliasi paska pilkada.

Hasil survei ini setidaknya telah mengkonfirmasi variasi jawaban 510 orang responden yang ada di 51 kelurahan yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Kupang. Variasi jawaban responden itu tampak dari alasan reponden memilih paket Calon Walkot/Wawalkot Kota Kupang atas nama: Yonas Salean-Niko Frans (Sahabat). Namun kecenderungan kuat lebih mengarah pada alasan kesamaan agama sebesar 13,50%. Sedangkan alasan responden memilih paket FirmanMu

juga tidak jauh berbeda dengan paket Sahabat, yakni sebesar 14,50%. Dengan demikian selisih angka/jumlah responden yang memilih karena alasan kesamaan agama dengan calon dari paket Sahabat: 13,50% dan FirmanMu: 14,50%, (lihat grafik 3 dan 4).

Dengan demikian antara paket Sahabat dan FirmanMu hanya terpaut selisih angka dukungan dari aspek agama sebesar 1% dan selisih angka secara keseluruhan dari aspek sosiologis sebesar 1,50%. Walaupun selisih angkanya sangat kecil namun bila angka tersebut benar-benar merepresentasi selisih dari besarnya dukungan warga Kota Kupang dari aspek agama maka sebenarnya angka ini cukup signifikan memberi kemenangan terhadap calon FirmanMu. Artinya calon walikota-wakil walikota atas nama tagline FirmanMu lebih banyak didukung oleh warga Kota Kupang karena alasan kesamaan agama dengan calonnya. Itu berarti tokoh-tokoh agama dari kalangan jemaat gereja Protestan maupun gereja Katolik di Kota Kupang sebagian besar akan memberikan dukungan pada calon atas nama tagline FirmanMu. Hal ini juga dapat dijelaskan dengan menggunakan penjelasan patron-klien, (Pamungkas, 2009) yaitu perilaku memilih sangat tergantung pada bagaimana perilaku elit panutannya (patron). Dalam konteks ini perilaku pemilih mengarah pada calon tertentu sangat dipengaruhi oleh apa yang dikehendaki atau direferensi oleh patron.

Data lain terkait aspek sosiologis adalah kesamaan daerah, etnis/ suku bangsa/ keluarga. Data yang berhubungan dengan hal ini juga memperlihatkan kecenderungan yang hampir sama bahwa mayoritas responden cenderung memilih karena selain karena alasan kesamaan agama juga karena alasan kesamaan daerah, etnis/suku bangsa atau keluarga. Sebelum mengkaji temuan penelitian terkait aspek kesamaan daerah, etnis/suku bangsa, setidaknya lebih awal diperlihatkan karakteristik responden. Dari jumlah 510 orang responden dapat diuraikan menurut daerah, etnis/ suku bangsa, antara lain: (a) Flores: 18 %, (b) Alor: 6%, (c) Timor: 26%, (d) Rote: 22%, (e) Sabu: 18%, (f) Sumba: 4%, (g) Lainnya: ( 6%). Secara metodologis keseluruhan data tersebut telah merepresentasi keragaman etnis/suku bangsa dari warga Kota Kupang.

Temuan penelitian pada aspek ini membuktikan bahwa mayoritas responden yang memilih calon walikota-wakil walikota dengan tagline: Sahabat (Yonas Salean-Niko Frans) maupun calon walikota-wakil walikota dengan tagline FirmanMu. Selain karena alasan agama, juga karena alasan kesamaan daerah, suku/keluarga, dengan angka yang jumlahnya sama besar yakni 14 %. Data ini menarik karena tidak ada calon yang dominan didukung dari aspek daerah, suku/keluarga karena kedua pasang calon ini memiliki basis dukungan yang sama-sama kuat (lihat grafik 3 dan 4).

Dengan demikian masing-masing pemilih selain memilih karena alasan kesamaan agama juga cenderung memilih calon karena alasan berasal dari daerah yang sama dan kemudian diperkuat dan diperluas oleh ikatan suku dan perkawinan maupun pertemanan antar suku dari masing-masing pendukung atau pemilih. Akibatnya keanekaragaman etnis/suku bangsa yang cukup beragam itu kemudian terpolarisasi dan terbelah dalam dua kutub calon pemimpin yang saling berhadap-hadapan satu sama lain dalam pesta demokrasi (pilkada) kali ini.

Salah satu aspek penting dari pendekatan sosiologis adalah kesamaan pekerjaan atau status sosial. Sudut pandang pendekatan ini melihat bahwa pemilih juga cenderung memilih calon karena didorong oleh adanya kesamaan pekerjaan atau status sosial dengan calon. Berdasarkan data yang dipaparkan berikut menunjukkan bahwa karakteristik responden cukup variatif dari aspek pekerjaan, antara lain: Buruh: 17%, Nelayan: 7%, Pemulung: 6%, Pedagang Kecil: 23%, Guru/Dosen: 20%, ASN/PNS: 22%, dan para Pensiunan sebesar 5%. Paparan data responden menurut pekerjaan di atas secara umum cukup mewakili semua kalangan masyarakat yang ada di Kota Kupang. Karena itu hasil dari pilihan responden terhadap aspek kesamaan pekerjaan/status sosial tetap menjadi bagian penting dalam analisis perilaku memilih. Data hasil olahan menunjukkan bahwa calon atas nama tagline: Sahabat dipilih karena alasan kesamaan pekerjaan/status sosial sebesar 3,50% dan FirmanMu sebesar 4%. Perbedaan angka atas aspek ini relatif kecil namun data ini cukup menarik karena mayoritas responden dari kalangan ASN/ PNS maupun Guru/Dosen maupun pedagang kecil lebih cenderung memilih calon FirmanMU. Meskipun selisih angkanya hanya terpaut 0,5% namun tetap penting dan diperhitungkan karena ikut memperbesar peluang kemenangan bagi calon atas nama tagline FirmanMu.

Bertolak pada data yang ada maka secara esensial dua paket calon atas nama tagline: Sahabat dan FirmanMu sama-sama memiliki kekuatan, potensi dan peluang memenangkan kompetisi dalam pilkada Kota Kupang. Hal itu berarti koalisi partai politik, tim sukses dan relawan yang memiliki basis dukungan sosial yang solid dan militan serta didukung oleh isu, strategi dan momentum yang tepat pada enam kecamatan di 51 kelurahan Kota Kupang hampir pasti akan memenangkan kompetisi merebut posisi jabatan sebagai Walikota-Wakil Walikota Kupang periode 2017/2022.

Sedangkan dari sisi pendekatan psikologis, temuan menarik dari survei ini adalah ternyata cukup banyak responden yang memilih paket calon walikota dan wakil walikota Kota Kupang karena faktor psikologis yakni pemilih menjatuhkan pilihan politiknya karena alasan mereka tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat memperbaiki keadaan (*political efficacy*).

Indikator faktor psikologis terdiri dari: (a) keterkaitan/kedekatan seseorang dengan partai politik atau kandidat; (b) orientasi seseorang terhadap isu-isu politik menyentuh kepentingannya yang disampaikan kandidat, seperti kemiskinan/pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih dan agenda pemberantasan KKN; (c) orientasi seseorang terhadap kualitas kandidat yang dipercaya mampu memperbaiki keadaan. Adapun temuan survei mengungkap perilaku memilih calon Walikota-Wakil Walikota atas nama tagline Sahabat karena alasan psikologis hanya sebesar 12% dengan uraian sebagai berikut: (1) alasan senang dengan kepemimpinan calon sebesar 4%; (2) alasan visi, misi, dan programnya menyentuh kebutuhan masyarakat sebesar 4%); (3) alasan calon mampu memenuhi janji kampanye sebesar 2,50%; (4) alasan karena yakin paket tersebut menang 1,50%.

Sedangkan responden yang memilih calon Walikota-Wakil Walikota atas nama tagline FirmanMu karena alasan psikologis hanya sebesar 9%, yang terdiri dari: (1) alasan senang dengan kepemimpinan calon sebesar 1,50%; (2) alasan visi, misi dan programnya menyentuh kebutuhan masyarakat sebesar 3%; (3) alasan calon mampu memenuhi janji kampanye sebesar 2%; (4) alasan karena yakin paket tersebut menang 2,50%.

Jumlah responden yang memilih calon Walikota-Wakil Walikota Kupang atas nama FirmanMu karena alasan psikologi sebesar 9% jauh lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan pemilih dari paket Sahabat sebesar 12%. Itu berarti jumlah pemilih dari paket Sahabat relatif jauh lebih rasional dari pada pemilih yang memilih paket FirmanMu. Apabila angka prosentasi kedua paket ini diakumulasi berdasarkan alasan psikologis maka sesungguhnya baru 21% pemilih Kota Kupang memilih calon pemimpin karena pertimbangan psikologis.

Temuan lain yang menarik pada survei perilaku pemilih kali ini, bahwa ternyata masih relatif tinggi pemilih yang memilih calon pemimpinnya dalam Pilkada Kota Kupang pada 15 Februari 2017, karena alasan pragmatis atau yang oleh Pamungkas disebut sebagai pemilih terlibat dalam aktivitas pemilu/pemilukada karena mendapatkan kompensasi tertentu, yakni alasan diberi bantuan barang/uang dari calon pemimpin atau tim sukses pasangan calon. Baik pemilih dari pasangan calon Sahabat maupun FirmanMu relatif cukup tinggi sebesar 15,50% dengan uraian sebagai berikut responden yang memilih calon pemimpin atas nama Sahabat karena pertimbangan diberi barang/uang, sebesar 7,50%. Sedangkan responden sebesar 8,50% memilih FirmanMu karena alasan diberi bantuan barang/uang. Itu berarti kekuatan modal berupa uang dan barang dalam memobilisasi dukungan suara atau mempengaruhi pilihan politik pemilih masih ikut menentukan kemenangan dari pasangan calon tersebut. Dengan demikian kekuatan modal finansial maupun barang/materi masih menjadi tawaran yang menggiurkan dalam memobilisasi dukungan.

Dalam kaitan dengan Pilkada Kota Kupang pada tahun 2017, setidaknya modal finansial dan barang ikut menentukan pilihan politik masyarakat Kota Kupang. Karena itu tidak menutup kemungkinan paket yang memiliki dana besar dan menguasai jaringan dan isu yang terkait program-program yang bersentuhan langsung dengan uang dan barang bagi warga kota berpeluang mendulang suara lebih besar, ketimbang sekedar memberikan janji yang belum tentu dapat dipenuhi sesudah selesai pilkada. Hal ini tentu menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi pengembangan demokrasi pada level lokal di masa yang akan datang.

## Penutup

Pilihan politik warga Kota Kupang terhadap dua pasang paket Walikota/Wakil Walikota pada Pilkada Kota Kupang 2017 masih cenderung berkarakter sosiologis. Dari total pilihan responden atas dua pasang paket tersebut, sebesar 63,50% masih dipengaruhi oleh kesamaan latar belakang sosiologis antara pemilih dengan calon pemimpinnya. Walaupun mayoritas warga Kota Kupang tergolong pemilih tradisional, namun masih ada sebagian kecil memilih karena alasan psikologis,

yaitu sebesar 21% dari akumulasi pilihan responden atas kedua pasang paket calon walikota/wakil walikota.

Temuan penelitian lain yang menarik adalah ternyata perilaku memilih sebagian warga kota juga dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis dalam memilih calon Walikota/ Wakil Walikota, yakni sebesar 16%, yaitu memilih karena alasan diberi barang/uang oleh calon atau tim sukses/relawan, atas nama tagline: Sahabat sebesar 7,50% dan FirmanMu sebesar 8,50%.

Kenyataan di atas menunjukkan kuatnya cengkeraman kultur sosial masyarakat yang terbentuk dari sentimen primordial agama, daerah dan suku ternyata lebih dominan daripada rasionalitas pemilih dalam memilih calon pemimpinnya. Karena itu dibutuhkan pendidikan politik yang lebih masif dan terstruktur di berbagai tingkatan agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi dan memilih calon pemimpin berdasarkan pertimbangan rasional. Selain itu, calon pemimpin kepala daerah yang direkrut oleh partai politik harus lebih sering memperkenalkan visi, misi, dan programnya sampai ke level yang paling bawah melalui publikasi media dan sosialisasi yang intens agar masyarakat memiliki pengetahuan luas dan pilihan-pilihan rasional dalam memilih calon pemimpin.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih pada tim survey dan para responden yang telah terlibat dalam penelitian untuk artikel ini.

### Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

### Daftar Pustaka

- Alfitri. (2014). *Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif dan Pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di Kelurahan Sako*. Palembang: Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III Palembang.
- Ambardi, K., Mujani, S., & Liddle, R. W. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Ananta, A., Arifin, E. N., & Suryadinata, L. (2004). *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Firmansyah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, A. (1992). *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- King, D. Y. (2003). *Half-hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Connecticut: Praeger Publishers.
- Mallarangeng, A. (1997). *Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior*. Northem Illinois University.

- Pamungkas, S. (2010). *Pemilu Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. Yogyakarta: Institut for Democracy and Welfarism (IDW).
- Qodari, M. (2007). *Split-Ticket Voting dan Faktor-Faktor yang Menjelaskannya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2004*. Universitas Gdjah Mada.
- Rakhmat, J. (2003). *Psiklogi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Roth, D. (2009). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode (terj)*. (D. Ambardi, Ed.). Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung dan LSI.
- Sarwono, S. W. (2006). *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Andi.

### Tentang Penulis

**Frans Bapa Tokan** adalah Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira.